

PERAN MILITER DALAM POLITIK LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT



Gonda Yumitro

America, which is known to be concerned about democracy and human right issues, seems like having big charity to guarantee the human life, welfare and safe in the entire world. And it becomes the nation's official brand. But in fact most of American foreign policies tend to have military characteristics, such as Iraq, Afghanistan, Vietnam, and a many other cases. In December 2007, American soldiers were stationed at more than 820 installations in at least 39 countries. Internally, the armed forces formation is very strong and supported by big financial budget. American armed forces lay on the top list among the countries because of its military expenses and budget. That is the why American military can influence American foreign policy. American armed forces in American foreign policy decision making system covered big opportunity, regardless of the strategic position of the actors. Consequently, military could gain their pragmatic interest to get budget supporting. This military policy was also powered by the characteristics of the president who would lead the rule.

Pendahuluan

Amerika adalah negara maju dengan sistem dan kondisi ekonomi, politik dan militer yang kuat. Amerika juga sangat *concern* memperjuangkan demokrasi dan penegakan hak asasi manusia, sehingga disebut sebagai negara paling demokratis dan ideal. *Resources of power* tersebut menjadikan Amerika sebagai polisi dunia. Penegakan hukum Internasional tidak bisa dipisahkan dari peran Amerika baik *independent* sebagai negara ataupun melalui berbagai media organisasi internasional. Dalam berbagai organisasi internasional itu, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Amerika memegang posisi strategis, berkaitan dengan proses penyelesaian berbagai persoalan internasional pula.

Posisi dan kekuatan Amerika yang “terhormat” ternyata tidak selamanya diiringi dengan kebijakan politik luar negeri yang arif dan mampu menumbuhkan simpati dunia internasional, terutama terhadap negara-negara berkembang (Islam). Kesewenangan, arogansi dan sikap tidak adil Amerika terlihat nyata. Amerika seringkali menyerang sebuah negara hanya dengan alasan praduga, seperti pada kasus Vietnam, Afghanistan, Irak, dan banyak kasus lain. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Amerika sebenarnya sangat tidak demokratis bahkan seringkali melakukan pelanggaran HAM, misalnya dalam kasus penjara Abu Ghraib di Irak. Warna kebijakan politik luar negeri Amerika yang militeristik semakin terlihat pasca serangan 11 September 2001. Peta politik dunia berubah menuntut Amerika senantiasa melakukan *pre-emptive policy* terhadap berbagai kemungkinan yang merintangi kepentingan negara adidaya tersebut atas nama demokratisasi dan penekanan HAM “ala Amerika”.

Sikap dualisme Amerika menarik untuk dikaji. Dalam suasana relatif aman sekalipun, Amerika tetap membangun pangkalan militer yang tersebar di beberapa kawasan, seperti Pasifik, Amerika Latin, Timur Tengah, dan Eropa Timur. Padahal cukup jelas bahwa militer dan politik luar

negeri mempunyai karakter yang berbeda. Militer lebih identik dengan kekerasan dalam menyelesaikan persoalan, sedangkan politik luar negeri mengutamakan cara-cara yang diplomatis untuk menciptakan perdamaian.

Kebijakan politik luar negeri Amerika yang demikian tentu bukan tanpa alasan. Berdasarkan gambaran di atas, tulisan ini ingin mencari tahu sejauh mana militer berperan dalam kebijakan luar negeri AS. Apakah militer hanya sebagai alat implementasi kebijakan luar negeri atau merupakan salah satu aktor strategis dalam perumusan kebijakan.

Hipotesis penulis adalah militerisme tidak serta merta mewarnai kebijakan luar negeri Amerika. Militer berperan penting dalam politik luar negeri Amerika baik pada saat perumusan kebijakan

Posisi dan kekuatan Amerika yang “terhormat” ternyata tidak selamanya diiringi dengan kebijakan politik luar negeri yang arif dan mampu menumbuhkan simpati dunia internasional, terutama terhadap negara-negara berkembang (Islam).

maupun ketika kebijakan tersebut diimplementasikan. Perumusan kebijakan mendasarkan pada logika elite, bahkan suatu keputusan cenderung merupakan sikap beberapa elite saja. Militer dalam hal ini menjadi elemen yang menjamin kesuksesan kebijakan yang diputuskan sipil, apalagi berkenaan dengan integritas negara Amerika.

Analisis untuk mengetahui sejauh mana peran militer dalam pengambilan kebijakan tersebut dapat dipahami dengan terlebih dahulu melihat kepentingan nasional Amerika. Kemudian sistem pengambilan kebijakan luar negeri Amerika,

¹ Pengertian tersebut sekadar membedakan militer dengan sipil yang dirumuskan berdasarkan karakteristik militer. Periksa dalam S.E. Finer, *The Man on Horseback, The Role of The Military in Politics*, New York, Frederick A. Praeger, 1962.

Peran militer menjadi penting dalam politik luar negeri Amerika karena kekuasaan suatu rezim hanya akan kuat apabila mendapatkan dukungan dari militer. Meskipun tetap harus dipahami bahwa militer juga merupakan organisasi yang mempunyai kepentingan. Dalam memahami hubungan antara militer dan kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat dapat digunakan teori kekuatan elite dan teori keseimbangan kekuatan.

termasuk aturan konstitusi, serta menilai aktor-aktor pengambil kebijakan. Semua data tersebut kemudian dianalisis sesuai dengan konteks politik internasional.

Landasan Konseptual

Militer merupakan elemen masyarakat bukan sipil, yang mempunyai pola komando terpusat, hierarki, disiplin, dengan tugas menjaga keamanan dan pertahanan suatu negara.¹ Sementara politik luar negeri adalah tujuan eksternal suatu negara serta teknik dan strategi untuk mencapainya.² Teknik dan strategi tersebut disesuaikan dengan potensi dan kondisi riil negara bersangkutan tentang kekuatan yang mampu memberikan nilai lebih sehingga lebih efisien sebagai *resources of power*, seperti ekonomi, militer, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi, sistem sosial budaya dan lain-lain.

Dalam menganalisis *resources of power* yang efektif dan efisien sistem organisasi negara Amerika, warna prinsip, orientasi dan karakter lembaga menghadapi perkembangan dunia menentukan potensi penggunaan *power* yang lebih tepat. Berkenaan dengan hal tersebut, perlu diketahui

beberapa prinsip utama politik luar negeri Amerika pasca perang dingin sebagai berikut:

- a. Mempertahankan keunggulan (*primacy*), yaitu mewaspadaikan kemungkinan munculnya pesaing-pesaing baru di tingkat regional seperti Cina atau Irak.
- b. Keterlibatan selektif (*selective engagement*), maksudnya menghindarkan diri terlibat konflik-konflik yang Amerika tidak memiliki kepentingan strategis di dalamnya, sehingga lebih fokus kepada kepentingan dalam negeri.
- c. *Concern* terhadap persoalan HAM, demokrasi, dan perdamaian dunia. Menurut Jimmy Carter, paling tidak beberapa hal yang hendak ditegakkan oleh Amerika ke seluruh dunia antara lain:
 - *the right to be free from governmental violation of the integrity of person.*
 - *the right to enjoy civil and political liberties.*
 - *the right to such vital needs as food, shelter, health care and education.*
- d. *Cooperatif institution*, dengan mempromosikan peranan global yang semakin besar melalui lembaga-lembaga multinasional.

Peran militer menjadi penting dalam politik luar negeri Amerika karena kekuasaan suatu rezim hanya akan kuat apabila mendapatkan dukungan dari militer. Meskipun tetap harus dipahami bahwa militer juga merupakan organisasi yang mempunyai kepentingan. Dalam memahami hubungan antara militer dan kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat dapat digunakan teori kekuatan elite dan teori keseimbangan kekuatan.

Teori kekuatan elite meyakini bahwa dalam proses pengambilan kebijakan strategis, terutama keputusan luar negeri, didominasi oleh kelompok elite yang terdiri atas pemerintah (*government*), pemilik modal atau pengusaha besar (*corporation*) dan militer, yang memiliki kepentingan bersama dan saling tergantung di bidang ekonomi, politik dan militer.³ Teori ini digunakan untuk melihat keterlibatan aktor dalam memutuskan kebijakan.

² Steffen Schmidt W. et.al. *American Government and Politic Today*. West Publishing Company, 1985, hal. 7.

³ S P Varma. *Teori Politik Modern*. Yogyakarta, Rajawali Pers, 2001, hal. 199

Sedangkan teori keseimbangan kekuatan adalah kecenderungan dari suatu negara untuk melakukan tindakan yang sama kualitas dan kuantitasnya dengan pihak lain yang berpotensi memberikan ancaman untuk menciptakan suasana yang stabil,⁴ berarti menekankan kepada argumen pengambilan suatu kebijakan.

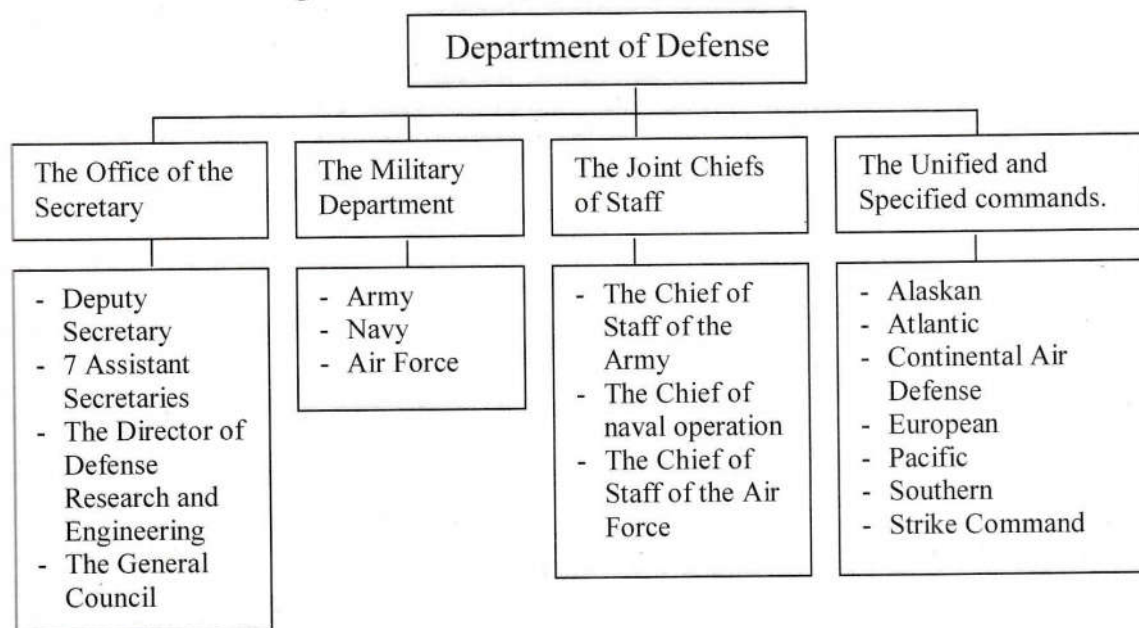
Konsep Militer AS

Militer AS berada dibawah supremasi sipil yang diwujudkan dengan adanya Departemen Pertahanan. Departemen Pertahanan merupakan departemen eksekutif dalam US Government yang dibentuk pada tahun 1949 berdasarkan amandemen

untuk berbagai misi baik di dalam maupun di luar negeri.

Berdasarkan Reorganizing Act 1958, Military Department tersebut dipisahkan dalam rantai komando operasional. Selanjutnya, rantai komando dari presiden diberikan kepada Menteri Pertahanan yang kemudian diteruskan kepada para Kepala Staf. Melalui Kepala Staf tersebut, perintah dari presiden kemudian dilanjutkan pada pemimpin komando yang berada di lapangan. Dengan demikian, struktur pertahanan AS sangat tersentralisasi dan hierarkis. Struktur organisasi dalam Departemen Pertahanan AS dapat dilihat dalam bagan 1.

Bagan 1. Struktur Organisasi Departemen Pertahanan AS



terhadap National Security Act 1947 yang mengatur struktur pertahanan AS (*National Military Establishment*) dan dipimpin oleh Menteri Pertahanan. National Security Act disusun dalam rangka mencegah dan mengurangi tumpang tindih wewenang dalam struktur pertahanan AS.

Menurut amandemen 1949, angkatan darat, laut dan udara berubah menjadi Military Department yang berada di bawah Departemen Pertahanan. Secara umum, military department tersebut bertugas mengorganisasi, melatih dan melengkapi personil

Adapun Military Department yang berada di bawah koordinasi Departemen Pertahanan AS adalah Department of the Army, Department of the Navy dan the Department of the Air Force. Ketiga Military Department tersebut dibentuk berdasarkan National Security Act 1947. Ketiga pimpinan Military Department tersebut diangkat langsung oleh presiden dengan konfirmasi US Senate.

The Department of the Army secara umum bertugas menjaga dan mengelola kedaulatan daratan AS. Adapun misi utamanya adalah *to fight and win our Nation's wars by providing prompt,*

⁴ Ernst Haas B. "The Balance of Power: Perception Concept or Propaganda?". *World Politic*, vol. 1253, hal. 442

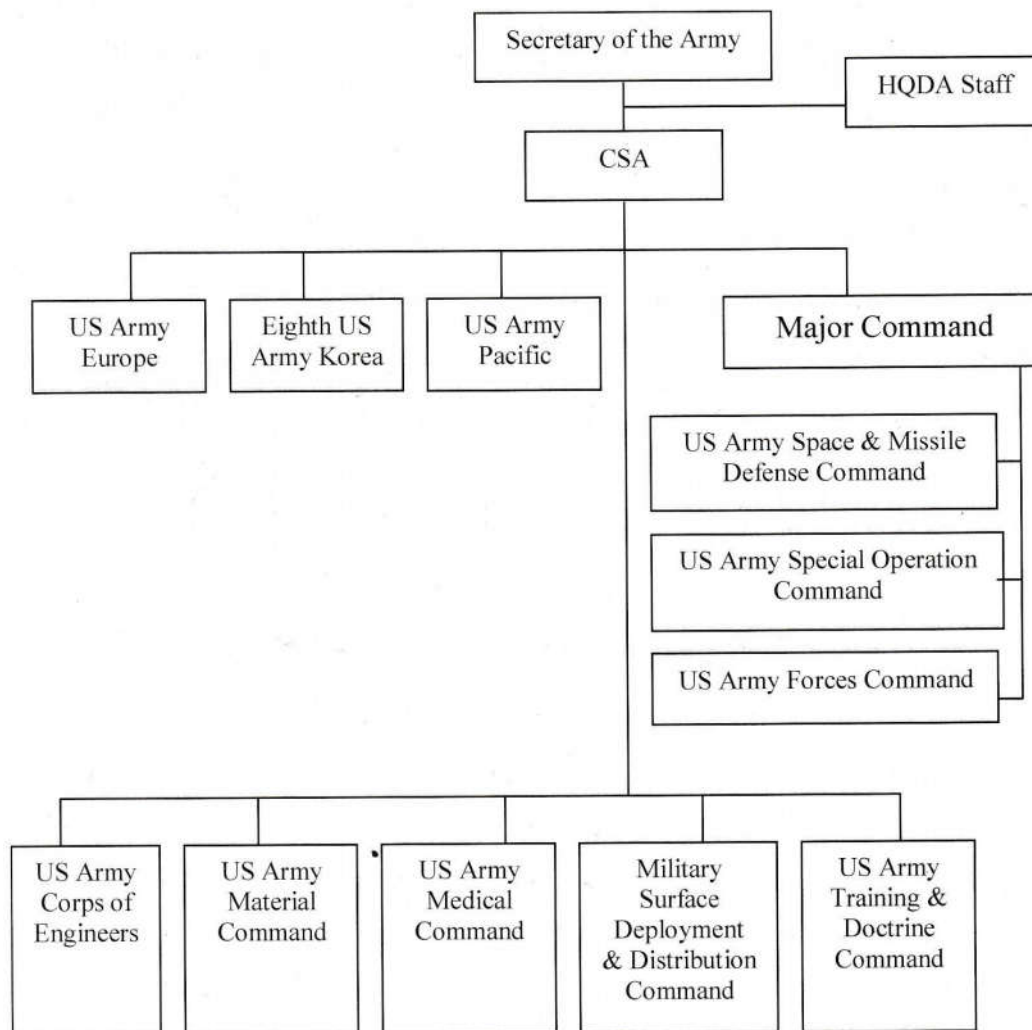
*sustained land dominance across the full range of military operations and spectrum of conflict in support of combatant commanders.*⁵

Berdasarkan tugas dan fungsinya, The Army dibedakan menjadi dua yaitu operational army dan institutional army. Operational army melakukan tugas operasional lapangan meliputi berbagai macam kegiatan operasi militer di seluruh dunia yang dilakukan oleh prajurit, corps, divisi, brigade maupun battalion. Sedangkan institutional army melakukan tugas institusional meliputi penyediaan infrastruktur seperti meningkatkan, mengembangkan dan melatih kesiapan prajurit untuk menghadapi perang melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan militer. Selain itu,

institutional army bertugas mempersiapkan *power-projection platform* berupa analisis lapangan untuk mendukung perang. Baik operational army maupun institutional army, keduanya saling mendukung. Tanpa institutional army, operational army tidak berfungsi. Tanpa operational army, institutional army juga tidak memiliki tujuan.

The Army terdiri dari pasukan aktif dan pasukan cadangan (*US Army Reserve dan Army National Guard*). Dalam keadaan damai, Army National Guard diperbantukan kedalam federal services yang bertugas menegakkan hukum dan keamanan public di negara bagian. Struktur organisasi the Army dapat dilihat pada bagan 2.

Bagan 2. Struktur Organisasi Department of the Army

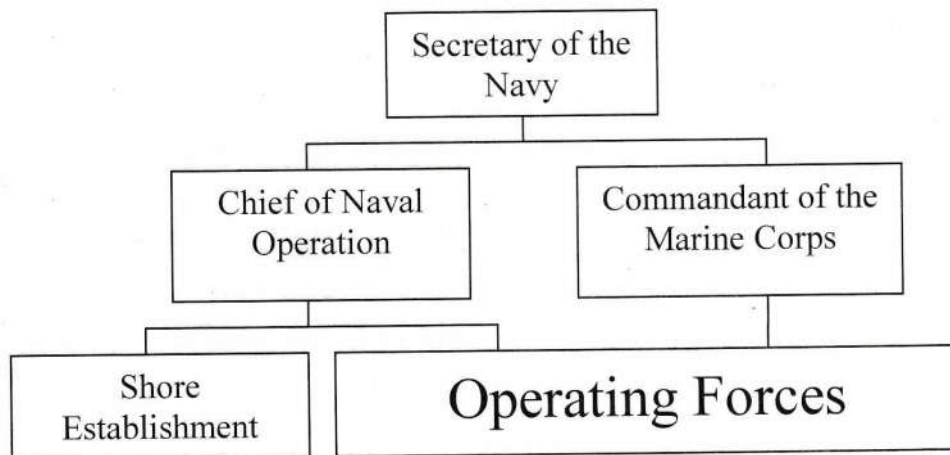


⁵ www.delta.dfg.ca.gov/afrp/acronym_template

Sedangkan Department of the Navy secara umum bertugas menjaga dan mengelola kedaulatan laut AS. Misinya adalah *to maintain, train and equip combat-ready Naval forces capable of winning wars, deterring aggression and maintaining freedom of the seas*.⁶ The Navy terdiri dari Executive Offices, the Operating Forces (Marine Corps, pasukan cadangan dan US Cost Guard) dan shore establishment. Struktur organisasi the Navy dapat dilihat pada bagan 3.

Adapun Departmen of the Air Force bertugas menjaga dan mengelola kedaulatan udara AS yang luasnya sebesar luas daratan dan perairan AS. Misi utamanya adalah *to deliver sovereign options for the defense of the United States of America and its global interests — to fly and fight in Air, Space, and Cyberspace*.⁷ The Air Force bekerja menurut tiga nilai utama yaitu *integrity first, service before self, and excellence in all we do*. Seperti halnya dua military department sebelumnya, the Air Force

Bagan 3. Struktur Organisasi Department of the Navy

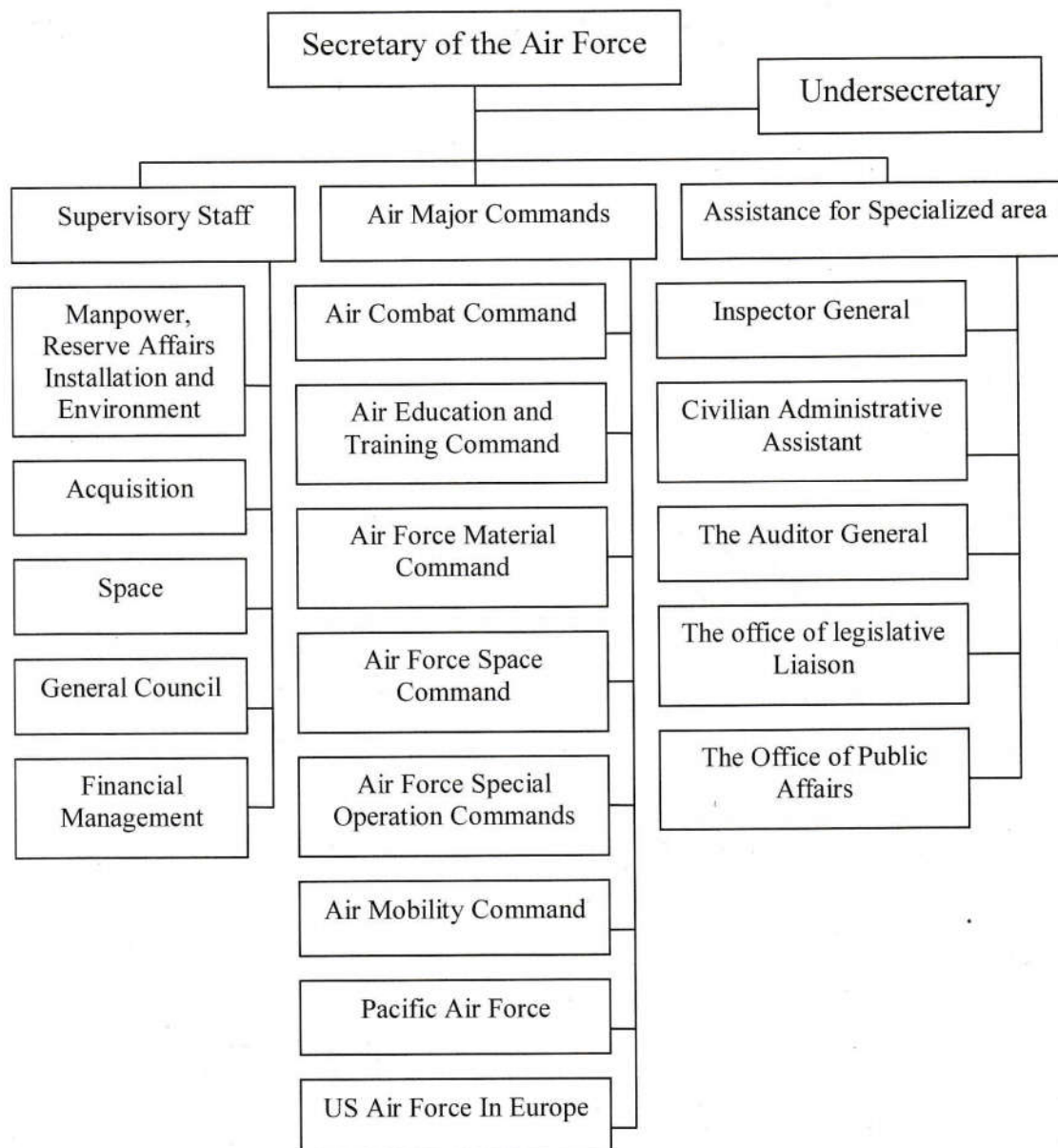


Seperti halnya the Army, Department of the Navy juga terdiri atas dua jenis pasukan yaitu pasukan aktif dan pasukan cadangan (*Marine Corps-Researve dan US Coast Guard*). Dalam keadaan damai, The Coast Guard bekerja dibawah koordinasi Departemen Transportasi dengan tugas utama menegakkan hukum laut dan property AS di lautan.

juga terdiri atas dua pasukan yaitu pasukan aktif dan pasukan cadangan (Air National Guard dan Air Force Reserve). Air National Guard dibentuk di masing-masing Negara bagian dengan koordinasi masing-masing gubernur Negara bagian. Struktur Departement of The Air Force bisa dilihat dalam bagan 4 sebagai berikut;

⁶ <http://www.navy.mil/navydata/organization/org-top.asp>

⁷ www.en.wikipedia.org/wiki/United_States_Air_Force

Bagan 4. Struktur Organisasi Department of the Air Force

Jumlah total personil militer AS adalah 2.885.213 personil yang terdiri dari 1,426,713 orang personil aktif dan 1,458,500 personil cadangan. Sementara yang bekerja di departemen pertahanan, tetapi sebagai sipil sebanyak 980.000 orang.

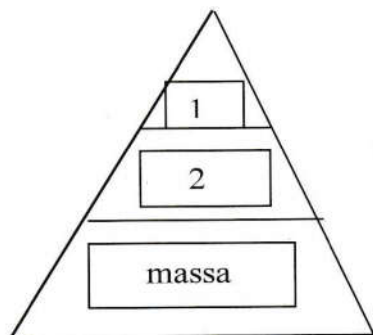
Terkait masalah anggaran, setelah isu teroris, George W. Bush menaikkan anggaran pentagon sebesar 15 % dari tahun sebelumnya. Hal ini merupakan peningkatan anggaran setelah presiden Ronald Reagan. Tahun 2006, anggaran militer

Amerika sebesar US\$ 380 milyar, atau 40 % dari seluruh anggaran militer dunia. Kemudian pada tahun 2007 meningkat menjadi US\$ 548.9 milyar dan pada tahun 2008 menjadi US\$ 583,283 milyar, yaitu hampir 2 kali anggaran militer semua Negara Uni Eropa US\$ 311,920. Akibatnya anggaran negara Amerika masa bush defisit US\$ 157 milyar, tidak seperti masa Bill Clinton yang mengalami surplus US\$ 405 milyar.⁸

⁸ James R Morris, James R (ed). *Reading in American Military History*. Upper Saddle River, NJ, Pearson Prentice Hall, 2004.

Militer AS dalam PLN**Mekanisme Pengambilan Kebijakan Luar Negeri AS**

Menurut konstitusi AS artikel I bagian 8, sebagian tugas kongres berhubungan dengan masalah Internasional, seperti pernyataan perang dan urusan perdagangan Internasional. Sedangkan inti artikel II adalah memberikan kekuasaan eksekutif kepada presiden. Dalam bagian I disebutkan bahwa presiden AS adalah panglima tertinggi angkatan



laut dan angkatan darat. Dalam bagian 2 memberikan kekuasaan kepada presiden untuk membuat traktat dengan negara lain. Jadi, presiden dan kongres mempunyai hubungan dengan masalah internasional. Namun presiden memiliki akses yang lebih besar karena membawahi CIA (*Centre Intelligence Agency*), Deplu dan Departemen Pertahanan.⁹

Secara struktural formal, beberapa pihak yang terlibat dalam pengambilan kebijakan luar negeri Amerika Serikat antara lain:

- a. Presiden
- b. *National security council*
- c. Departemen luar negeri

- d. *Central Intelligence Agency (CIA)*
- e. Departemen Pertahanan, dan
- f. Kongres¹⁰

Sementara Mills percaya bahwa terdapat tiga level kelompok dalam pengambilan kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat, yaitu elite, pejabat pemerintah, legislatif dan kelompok kepentingan, dan massa.¹¹ Jika digambarkan sebagai berikut:

Sumber :

David Marsh and Gerry Stoken. *Theory and Methods in Political Sciences*. London : Mac

- Ket :
1. Elite
 2. Pejabat pemerintahan, legislatif dan kelompok kepentingan

Adapun proses yang sesungguhnya berlangsung sebagaimana teori kekuatan elite yang menggambarkan Amerika terdiri dari tiga institusi besar, yaitu :

- a. Pemerintah
- b. Pemilik modal dan pengusaha
- c. Institusi militer yang terdiri dari pejabat teras perwira militer (*high-ranking military officer*).¹²

Kepentingan Militer dalam PLN AS

Meskipun sudah digambarkan secara organisatoris tentang posisi militer dalam pengambilan kebijakan PLN AS, tetapi hal tersebut tidak cukup tanpa melihat militer juga sebagai lembaga yang mempunyai kepentingan. Tidak

⁹ Olenke Fatten HP. *Latar Belakang Penerapan Drug War Policy Amerika Serikat di Kolombia* (skripsi). Fisipol UGM, Yogyakarta 2003.

¹⁰ Bambang. *Politik dan Pemerintahan Amerika, Politik dan Pemerintahan Amerika*. Lingkaran, Yogyakarta, 2003, hal. 203-209

¹¹ C Wright Mills, *The Power Elite*, Oxford University Press, New York, 1956, hal. 556.

¹² *Ibid.*

semua organisasi profesional bekerja sesuai dengan fungsinya. Bagian ini akan mencoba melihat persoalan tersebut bahwa konflik sangat mungkin terjadi dalam pengambilan kebijakan terkait perbedaan kepentingan antar departemen.

Beberapa kepentingan militer AS tersebut misalnya berkenaan dengan:

1. Anggaran, yaitu masalah besar kecilnya budget yang diberikan kepada militer.
2. Kepentingan atas ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung untuk melaksanakan tugas pertahanan negara.
3. Integritas terhadap bangsa; bahwa militer sangat diperlukan dalam suasana sekarang untuk meraih berbagai kepentingan Amerika yang kontroversial.

Dari poin-poin tersebut dapat dipahami bahwa semakin banyak program strategis militer sebagai “warna” kebijakan populis negara, akan semakin banyak pula alokasi anggaran yang didapatkan. Persoalan rasionalisasi untuk menguatkan kesan bahwa militer merupakan aktor dominan dalam menangani suatu isu sehingga memberikan “warna khas” dapat dirancang.

Aktor

Analisis aktor sebagai bukti kekuatan level individu sebagaimana tersebut dalam teori kekuatan elite mempunyai peran penting dalam politik luar negeri Amerika. Beberapa presiden Amerika adalah mantan militer. Disisi lain, kebutuhan informasi tentang teknis tindakan militer menempatkan militer Amerika pada posisi strategis, terutama diwakili oleh pejabat – pejabat teras dan mantan militer. Merekalah yang membawa warna militer dalam PLN AS. Dalam memutuskan kebijakan, aktor – aktor strategis PLN, termasuk kekuatan militer ketika memberikan masukan kepada presiden menggunakan logika perimbangan kekuatan.

Hal ini menunjukkan bahwa militer AS sebenarnya merupakan pihak yang berpengaruh dalam pengambilan kebijakan, bukan diperalat dan hanya dijadikan sebagai alat implementasi kebijakan

luar negeri. Jika militer tidak berperan dalam pengambilan kebijakan, maka tatanan implementasi tidak akan cukup rapi, bahkan mengundang kudeta seperti yang terjadi di beberapa negara. Minimal ada proses politik sehingga kepentingan militer sebagai institusi tidak diabaikan selain *rational reason of state's*. Sayang, data yang menunjukkan aktor – aktor militer dalam perumusan kebijakan tersebut sulit dilacak.

Implementasi: Studi Kasus

Pembahasan tentang implelementasi politik luar negeri Amerika dalam kaitannya dengan peran

Jika militer tidak berperan dalam pengambilan kebijakan, maka tatanan implementasi tidak akan cukup rapi, bahkan mengundang kudeta seperti yang terjadi di beberapa negara.

militer sebagai gambaran bahwa hegemoni militerisme dalam PLN AS menguasai semua tempat strategis, terlepas dari penggunaan berbagai alasan seperti demokrasi dan penegakan HAM sebagai pembenaran mereka melakukan intervensi terhadap suatu negara. Dalam hal ini, militer dijadikan sebagai instrumen utama kebijakan luar negeri di berbagai belahan bumi.¹³

Berdasarkan data bulan Desember 2007, tercatat bahwa militer Amerika menempati 820 titik di seluruh dunia yang meliputi 39 negara. Beberapa titik strategis yang dikuasai militer Amerika dengan melibatkan militer untuk meraih kepentingannya tersebut antara lain:

▪ Eropa Timur

Amerika tidak mengijinkan kekuasaan lain menguasai Eropa dan Pasifik¹⁴ sehingga militer

¹³ Wahyudito G Indiharto, *Isu Minyak Dalam Kebijakan War on Drugs di Kolombia, Studi Kasus: Plan Colombo* (skripsi), Fisipol UGM, Yogyakarta, hal. 15-16.

¹⁴ Mearsheimer, “The Future of American Facility”, *Foreign Affairs*, September/Oktober, 2001, hal.

dilibatkan dalam PLN AS untuk memutuskan dan mengimplementasi pengiriman *special forces* ke wilayah Kaspia, Azerbaijan, Kazakhtan, Kyrgistan, dan Djibouti.¹⁵ Penempatan militer di Eropa Timur dinilai strategis terutama mengantisipasi kemungkinan bangkitnya kembali kekuatan komunis Internasional. Tentunya hal ini sebagai upaya “pengamanan” eropa secara keseluruhan. Dalam politik Internasional dikenal pribahasa, “jika ingin menguasai dunia, maka kuasailah Eropa”. Rasionalisasinya bahwa tuntutan era sekarang adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan Eropa sebagai simbol.

▪ Amerika Latin

Peran militer sangat terlihat dalam keputusan pengiriman pasukan ke Kolumbia. Termasuk juga pada masa perang dingin dalam kasus teluk babi, Kuba. Selain alasan ideologi yang masih cukup kental, eksistensi Amerika di Amerika Latin juga berkaitan dengan upaya menjaga jaminan pasokan sumber daya alam, terutama minyak untuk pengembangan industri. Meskipun demikian, terkadang isu yang diangkat adalah kesan bahwa Amerika mempunyai *charity* dalam membongkar kasus candu, dan kemiskinan di kawasan ini.

▪ Kawasan Pasifik

Argumen utama yang dibawa militer terkait kawasan ini berkaitan dengan masalah keamanan, misalnya di Taiwan tentang wilayah negara dan pengembangan senjata nuklir Korea Utara. Persoalan bertambah pasca tragedi 11 September 2001 terkait keberadaan para milisi “teroris” yang dinilai terdapat di Indonesia, dan Filipina.

Di Asia Pasifik, total pasukan Amerika berjumlah 100 ribu, bertugas mencegah perang dan memenuhi komitmen pertahanan terhadap sekutunya. Beberapa aliansi Amerika tersebut antaralain Jepang, Korea Selatan, Australia, Thailand dan Filipina.

▪ Timur Tengah

Militer dalam politik luar negeri lebih cenderung dilihat sebagai alat politik luar negeri Amerika yang ingin menguasai Timur Tengah sebagai penghasil 2/3 seluruh cadangan minyak

dunia. Amerika memahami bahwa tidak mungkin menguasai Eropa sebagai simbol kekuatan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa menguasai minyak, karena teknologi tidak bisa digerakkan tanpa bahan bakar. Terlepas dari minyak, alasan lain dalam bidang politik dan budaya tidak dapat diabaikan. Posisi geopolitik Timur Tengah sangat strategis karena terletak di antara tiga benua sekaligus, yaitu Eropa, Afrika dan Asia. Posisi ini mempermudah kontrol dan penguasaan terhadap kawasan lain dengan biaya yang relatif murah. Secara budaya, Timur Tengah merupakan pusat peradaban dunia karena merupakan tempat lahirnya tiga agama besar, yaitu Yahudi, Nasrani dan Islam. Penguasaan kawasan ini akan mempermudah memberikan warna lain dalam perkembangan ide tiga agama besar tersebut. World view yang “American” akan lebih mudah dicapai dengan cara ini.

Militer perlu turun tangan karena karakteristik bangsa di kawasan ini cukup kesar. Kepentingan Amerika yang besar di Timur Tengah perlu dikawal oleh militer. Secara lembaga, militer mendapatkan keuntungan berupa kenaikan anggaran dan penyediaan prasarana perang yang lebih lengkap. Peran nyata militer terlihat dalam kasus Irak dan Israel.

▪ Afrika

Hampir sama dengan keadaan di Timur Tengah bahwa militer cenderung dijadikan sebagai alat kekuatan politik, misalnya dalam kasus Nigeria, Sudan, Angola, Maroko, Tunisia. Biasanya militer Amerika masuk dengan memanfaatkan konflik internal dengan alasan pengamanan suasana, dan pemberian bantuan militer.

Penutup

Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat bahwa peran militer sangat strategis dalam pengambilan kebijakan PLN Amerika. Warna militer tidak datang begitu saja, tetapi juga karena kemampuan organisasi internal militer kuat dan kebutuhan keterlibatan militer oleh negara. Dalam hal ini, tidak bisa dimaknai bahwa militer Amerika telah dimanfaatkan oleh actor-aktor strategis dengan dalih kepentingan nasional.

¹⁵ AI Commentary Saccon, “Forward Strategy Aids to Dictators” dalam. [www. ciponline.org/ aids-dictators.html](http://www.ciponline.org/aids-dictators.html).

Terkait dengan peran yang diberikan, militer Amerika terlibat dalam dua aspek berkaitan dengan politik luar negeri Amerika, yaitu:

- a. Militer (yang diwakili *elite*) punya posisi strategis dalam merumuskan kebijakan
- b. Militer terlibat sebagai implementator kebijakan PLN yang diambil.

Dengan cara demikian, Amerika mampu semakin menguatkan eksistensinya dalam berbagai persoalan Internasional.

Daftar pustaka

- Christopher, W. 1995. *America Leadership, America Opportunity*. Foreign Policy. Spring.
- Cipto, Bambang. 2003. *Politik dan Pemerintahan Amerika*. Yogyakarta: Lingkaran.
- Fatten HP, Olenke. 2003. *Latar Belakang Penerapan Drug War Policy Amerika Serikat di Kolombia* (skripsi). Yogyakarta : HI UGM.
- Haas, Ernst B. *The Balance of Power: Perception Concept or Propaganda?*. World politic, v. 1253.
- Indiharto, Wahyudito G. 2005. *Isu Minyak Dalam Kebijakan War on Drugs di Kolombia, Studi Kasus: Plan Colombo* (skripsi). Yogyakarta: HI UGM.
- Mayasari, Iin. 1996. *Penarikan Pangkalan Militer AS dari Teluk Subik dan Lapangan Udara Clark di Filipina* (skripsi). Yogyakarta: HI UGM.
- Mearsheimer. 2001. *The Future of American Facility*. Foreign affairs. September/Okttober
- Mills, C Wright. 1956. *The Power Elite*. New york: Oxford University Press.
- Morris, James R (ed). 2004. *Reading in American Military History*. Upper saddle river. NJ : Pearson Prentice Hall.
- Posey, Pollin Bennet. 1983. *American Government (eleventh edition)*. Totowa: Rowman Press.
- Schmidt, Steffen w. etc. 1985. *American Government and Politic Today*. West Publishing Company.
- Varma s. p. 2001. *Teori Politik Modern*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Encyclopedia Americana International Edition*. 2004. Danbury Connecticut: Scholastic Library Publishing, Inc.
- Sacson, AI. Commentary: *A "Forward Strategy " Aids to Dictators*. [www. ciponline.org/ aids-dictators.html](http://www.ciponline.org/aids-dictators.html).
- www.delta.dfg.ca.gov/afrr/acronym_template
- www.navy.mil
- www.russia.shaps.hamail.edu/security/us/cinccpac200220305testimony.html.
- www.wikipedia.org/wiki/United_States_Air_Force